

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA
ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Islam (S.HI) Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

NUR WAHID MUSHADDIQ
NIM:10300111047

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Wahid Mushaddiq
NIM : 10300111047
Tempat/Tgl Lahir : Makassar/05 Mei 1994
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPK
Angkatan : 2011
Alamat : Jl. Toa Daeng III Lr. 12 Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Seksual pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam* adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, 10 Desember 2015

Penyusun,

Nur Wahid Mushaddiq
NIM. 10300111047

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam" yang disusun oleh saudara Nur Wahid Mushaddiq, Nim: 10300111047, mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, Jumat tanggal 18 Desember 2015 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas 'Syari'ah dan Hukum, dengan beberapa perbaikan.

Samata-Gowa, 18 Desember 2015 M
6 Rabiul Awal 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Dudung Abdullah, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup kurang lebih 4 (tahun) begitu terasa dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, dapat merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu, sembari berserah diri dalam kerendahan hati dan kenistaan diri sebagai seorang hamba, maka sepantasnyalah puji syukur hanya diperuntukan kepada Sang Maha Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., suri tauladan seluruh umat manusia, penyusun kirimkan shalawat dan salam kepada beliau serta para sahabat yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup.

Sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan Allah swt. yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka tepatlah bila menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sederatan hamba Allah swt. yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan, kiranya dicatat oleh Allah swt. sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs. H. Muh. Amin Sulo, MM dan Ibunda tercinta Hj. Nur Asia Nur, semoga Allah swt. melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. Sebagaimana dia mendidik penyusun semenjak kecil, yang atas asuhan, limpahan kasih sayang serta dorongan dari keduanya, penyusun selalu memperoleh kekuatan materil dan moril dalam mendapati pencarian hakikat diri.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh pembantu Rektor.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh pembantu dekan.
4. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M. Si. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Kurniati, M.HI selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan saran, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. dan Dr. Dudung Abdullah, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh dedikasi, keiklasan, dan kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan-masukan keilmuan yang sangat berharga hingga saat selesainya penyusun skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang pernah mengajar dan membimbing. Permohonan maaf apabila ada perbuatan, ucapan serta tingkah laku yang tidak sepatutnya pernah penulis lakukan.

7. Ibu Kepala perpustakaan beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
8. Saudari Andi Putri Al-Maidah yang telah memberikan support dan dukungannya dalam penyelesaian, saya ucapkan banyak terima kasih.
9. Saudara-saudara seperjuangan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) angkatan 2011 terima kasih atas kebersamaanya selama 4 tahun. Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin

Wassalamu' Alaikum Wr. Wb

Makassar, 10 Desember, 2015

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R

Nur Wahid Mushaddiq
NIM. 10300111047

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI..	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK	
A. Pengertian Eksploitasi Seksual pada Anak menurut UU Perlindungan Anak	14
B. Klasifikasi Eksploitasi Seksual pada Anak menurut UU Perlindungan Anak	17
C. Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual pada Anak menurut UU Perlindungan Anak.....	18
D. Hak-hak Asasi Anak menurut UU Perlindungan Anak	22
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Eksploitasi Seksual pada Anak menurut Hukum Islam	35
B. Klasifikasi Eksploitasi Seksual pada Anak menurut Hukum Islam	39

C. Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual pada Anak menurut Hukum Islam	40
D. Hak-hak Asasi Anak menurut Hukum Islam	44

**BAB IV ANALISIS TINDAKAN KRIMINAL EKSPLOITASI SEKSUAL
PADA ANAK MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM
ISLAM**

A. Tindakan Kriminal Eksploitasi Seksual pada Anak menurut UU Perlindungan Anak	56
B. Tindakan Kriminal Eksploitasi Seksual pada Anak menurut Hukum Islam	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Implikasi Penelitian	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75
-----------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
--------------------------------	-----------

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathahdanya</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	I dan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	u	U dan garis di atas

Contoh: مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّيْنَا : *najjaina*
الْحَقُّ : *al-haqq*
الْحَجَّ : *al-hajj*
نُعِمَ : *nu“ima*
عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh: عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fi Zilal al-Qur'an*

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِإِلَهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadunillarasul

Innaawwalabaitinwudi 'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'a>n

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu> (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

UIN = Universitas Islam Negeri

HPK = Hukum Pidana Ketatanegaraan

UU = Undang-Undang

RUU = Rancangan Undang-undang

HKI = Hak Kekayaan Intelektual

RI = Republik Indonesia

HAM = Hak Asasi Manusia

swt. = Subhanau wa ta'ala

saw. = Sallallahu 'alaihi wa sallam

QS.../..... = QS al Baqarah/2: 168, QS at Taubah/9: 29

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الى اخرها/ الى اخره
ج	=	جزء



ABSTRAK

Nama Penyusun : Nur Wahid Mushaddiq

Nim : 10300111047

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Seksual pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Skripsi ini merupakan studi tentang Eksploitasi Seksual pada Anak. Eksploitasi Seksual terhadap Anak adalah penggunaan atau pemanfaatan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksual anak tersebut. Tindakan Eksploitasi Seksual pada Anak sudah marak di Indonesia dan sangat meresahkan masyarakat.

Tujuan penulisan ini untuk memberikan gambaran tentang pengeksploitasian seksual pada anak menurut UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam serta masuk tidaknya eksploitasi seksual pada anak kepada tindak kriminal menurut UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis.

Dari uraian proses pengkajian tersebut, maka diperoleh suatu analisa dengan kesimpulan bahwa eksploitasi seksual pada anak adalah tindakan memanfaatkan tenaga seseorang untuk dijadikan pekerja seksual secara berlebihan untuk keuntungan diri sendiri baik yang bersifat materiil atau non materiil. Menurut UU Perlindungan Anak, perbuatan eksploitasi seksual pada anak termasuk pada tindak kriminal karena telah melanggar pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya dan dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) - 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000,00 - Rp.300.000.000,00. Sementara dalam Hukum Islam diberikan sanksi hukuman *had* yaitu jilid dan pengasingan bagi pelaku *ghairu muhshan*, sedangkan hukuman rajam berlaku bagi pelaku *muhshan*; sanksi hukuman *qishash* berupa hukum balas kematian atau pelukaan dan bila dimaafkan diganti dengan membayar sejumlah diyat; dan sanksi ta'zir yang diserahkan kepada hakim jenis dan bentuk hukumannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk menanggulangi masalah ini sebaiknya orang tua, lembaga pendidikan dan lembaga hukum memberikan perlindungan, pengajaran (akhlak, agama, moral) terhadap anak dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya pada pelaku supaya jera dan menjadi pelajaran bagi calon pelaku lainnya sebagai upaya tindak preventif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anak dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *Internasional on Civil and Political Right* (ICPR). Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh, dan

berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari kesejahteraan. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga, begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Bila anak sejak masih dalam kandungan sampai dilahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan bangsa, maka anak yang menjadi orang dewasa melalui proses tersebut, yang bersangkutan tidak akan dapat mengerti dan memahami hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan sangat merugikan generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara yang akan menimbulkan kerawanan bila menjadi tiang dan fondasinya. Untuk mencegah hal tersebut diatas, maka

memerlukan hukum perlindungan anak secara konkret baik substansial, struktural, maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara semakin kokoh, kuat dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.¹

Berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 20, yang wajib memberikan perlindungan kepada anak adalah Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, wali dan lembaga sosial agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hukum Islam juga memberikan hak-hak anak yang mutlak, antara lain seperti:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan sejak masih dalam kandungan atau rahim ibunya. Secara umum ada dalam QS al-Israa/17: 31 yang melarang membunuh anak termasuk ketika masih dalam kandungan, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

¹Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2014, h. 1.

Terjemahnya :

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*²

b. Hak untuk disusui selama dua tahun terdapat dalam QS al Baqarah/2:

233, yaitu:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۳۳ ﴾

Terjemahnya :

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*³

c. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua,

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah* (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawi, 2013) h.388

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h.47

- d. Hak untuk diberikan pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar.

Khalid N. Ishaque, seperti dikutip Abdurrahman Wahid, merumuskan tentang pokok-pokok hak-hak asasi manusia dalam Islam, sebagaimana telah tertuang dalam Al Quran diantaranya yaitu: Hak untuk memperoleh perlindungan, Hak memperoleh keadilan, Hak memperoleh persamaan perlakuan, Hak memperoleh kemerdekaan, Hak menyatakan pendapat, Hak atas perlindungan, dll.⁴

Semua uraian diatas menegaskan bahwa anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Dalam suatu hadist lebih dirinci hak-hak anak dari orang tuanya, yakni:

1. Memberi nama dengan nama yang baik;
2. Menyembelih hewan aqiqah;
3. Mengkhitankannya;
4. Memberi kasih sayang;
5. Memberi nafkah (biaya hidup dan biaya pendidikan serta lain sebagainya);
6. Memberikan pendidikan dan pengajaran, terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan akhlak Islam;
7. Menikahkan setelah dewasa.⁵

Berdasarkan uraian di atas ternyata ada masalah yang menarik untuk di kaji yang berkaitan dengan masalah pengeksploitasian seksual pada anak

⁴Juraidi, *Jerat Perbudakn Masa Kini*, Jakarta: Bina Purna Pariwara, 2013, h. 81.

⁵Juraidi, *Jerat Perbudakn Masa Kini*, h. 52.

yang dituangkan dalam judul Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.

B. *Rumusan Masalah*

Agar lingkup pembahasan lebih terarah dan tidak melampaui batas apa yang seharusnya dibahas dalam pokok masalah, maka peneliti membatasi permasalahan pada hal-hal berikut. Adapun sub-sub masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Apa makna/esensi eksploitasi seksual pada anak menurut UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam?
3. Mengapa eksploitasi seksual pada anak termasuk kepada tindak kriminal ditinjau dari UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam?

C. *Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan*

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian judul, terasa perlu dikemukakan pengertian beberapa buah kata yang telah disebutkan pada penulisan judul. Dari pengertian kata-kata tersebut selanjutnya akan memberi batasan dari judul yang akan dibahas. Adapun kata yang dimaksud adalah :

1. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum

memindahkan dan mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁶

2. Seksual yaitu berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁷
3. Anak adalah keturunan kedua, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁸
4. Hukum Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹
5. Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan pada norma-norma agama Islam untuk mengatur kehidupan manusia yang bermasyarakat khususnya pemeluk agama Islam.¹⁰

Pengertian-pengertian yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Eksploitasi Seksual terhadap Anak adalah penggunaan atau pemanfaatan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam

⁶Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

⁷Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

⁸M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 8.

⁹Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 6.

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akamedika Presindo, 2004.

bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksual anak tersebut.

D. *Kajian Pustaka*

Dalam kajian pustaka ini, penyusun akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya :

Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, S.H, M.H dan Adri Desasfuryanto, SH, MH, dalam bukunya *Hukum Perlindungan Anak*, buku ini memaparkan tentang kedudukan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap anak serta rencana nasional dalam penghapusan terhadap penggunaan anak dalam keadaan terburuk. Selain itu, buku ini juga membahas tentang negara-negara harus meratifikasikan konvensi-konvensi Internasional tentang perlindungan anak dan menjadikan sebagai substansi peraturan perundang-undangan.

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H, M. Hum., dalam bukunya *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, buku ini memaparkan tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan serta hak identitas anak dan kebijakan hukum atas hak identitas anak.

Esthi Susanti Hudiono, dalam bukunya *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual* (Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil), karyanya ini membahas tentang beberapa kisah nyata korban yang diceritakan kembali dalam hal eksploitasi seksual anak dan beberapa kisah dipemberitaan media cetak yang dimuat dalam buku ini, serta menguraikan kronologi terjadinya eksploitasi seksual pada anak.

M. Nasir Jamil, dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum*, buku ini memaparkan tentang bagaimana pembaca dapat memahami hak anak dan upaya perlindungan anak serta menjelaskan sistem-sistem peradilan anak yang mencakup dimensi, dinamika, dan aspek-aspek hukum sistem peradilan anak di Indonesia, dan didalam buku ini juga menjelaskan institusi-institusi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan beberapa metode penelitian baik dalam pengumpulan data maupun pada saat pengolahan data. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Yuridis

Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

dan Undang-undang yang terkait tentang Eksploitasi Seksual Terhadap Anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Dalam metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.

b. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Suatu metode pendekatan yang berdasarkan dan bertolak dari dalil-dalil syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw., yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

c. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Dalam pendekatan metode ini yaitu melihat dari kejadian-kejadian yang muncul dalam masyarakat seperti pemberitaan-pemberitaan oleh media massa tentang kejahatan.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh dari data-data primer dan sekunder.

- a. Data Primer : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Data Sekunder : Berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam bidang eksploitasi seksual terhadap anak untuk digunakan dalam

membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

1. *Identifikasi Data* yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
2. *Editing Data* adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menentukan jawaban pokok permasalahan.

b. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penyusun menggunakan deskriptif analisis, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penyusun dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut *content analysis*. Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan analisis data yang dengan dipergunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui makna/esensi dari eksploitasi seksual pada anak menurut UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui alasan-alasan eksploitasi seksual pada anak termasuk kepada tindak kriminal ditinjau dari UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

- 1) Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
- 2) Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

b. Manfaat Akademis

- 1) Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural, dan kultural hukum perlindungan anak.
- 2) Memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum dengan mencoba membandingkan antara hukum perlindungan anak dan hukum pidana Islam.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK

A. *Pengertian Eksploitasi Seksual pada Anak menurut UU Perlindungan Anak*

Pengertian dari kata eksploitasi seksual pada anak terbagi menjadi tiga bagian yaitu eksploitasi, seksual, dan anak. Ketiga bagian itu akan dibahas secara terpisah yang pada akhirnya akan menjadi suatu makna. Pengertian eksploitasi menurut bahasa adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang lain. Sedangkan makna eksploitasi menurut terminologi adalah kecenderungan yang ada pada seseorang untuk menggunakan pribadi lain demi pemuasan kebutuhan orang pertama tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi kedua.¹

Menurut UU Perlindungan Anak bahwa eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlakukan, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.² Pengertian seksual secara bahasa adalah proses penggabungan dua sel gamet yang dihasilkan induk jantan dan betina, sehingga menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan menjadi individu baru.

Ada pula yang mendefinisikan pengertian dari seksualitas itu sendiri adalah peninjauan dari segi kejiwaan tentang cara-cara seseorang memenuhi

¹Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 180.

²Citra Umbara, *UU Perlindungan Anak*, Bandung, 2003, h. 50.

dan mendapatkan kepuasan dalam menyalurkan dorongan seksnya. “Pengalaman seksual secara normal ialah heteroseksualitas, yaitu menyalurkan dorongan seks dan memperoleh kepuasan dengan jenis kelamin berlawanan dan dengan cara-cara normal juga”.

Pengertian seksual menurut terminologi adalah menyinggung hal reproduksi/perkembangbiakan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma atau secara umum, perangsangan alat kelamin, daerah-daerah erogenus, atau dengan proses perkembangbiakan.³

Menurut Dede Oetomo, seks adalah perbuatan yang melibatkan kenikmatan saraf-saraf di tubuh dan acapkali terlampau terpaku pada organ tubuh yang dipahami sebagai alat kelamin tetapi juga melibatkan organ lain seperti tangan, dada, sela paha, mulut, dan dubur.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, nampaknya tidak ada perbedaan pendapat, karena definisi seksual semuanya mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh dua individu yang berbeda yang melibatkan kenikmatan pada saraf-saraf tubuh.

Sekalipun demikian, mempelajari seksualitas pada manusia berarti mempelajari keseluruhan proses pembentukan diri seseorang. Fenomena seks yang multidimensional mencakup hampir seluruh aspek dalam diri manusia, baik itu aspek biologis, psikologis, sosial, behavioral, klinis, maupun aspek sosio-kultural. Aspek-aspek ini terintegrasi seluruhnya dalam perilaku

³Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, h. 459.

seksual manusia. Identitas seksual mempunyai dasar yang paling nyata dan lengkap yaitu tubuh dan jiwa.

Pengertian anak secara bahasa adalah manusia yang masih kecil (belum dewasa). Sedangkan pengertian anak secara terminologi adalah “seseorang yang belum mencapai tingkat kedewasaan, bergantung pada sifat referensinya. Istilah tersebut bisa berarti seorang individu di antara kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa kecil) dan masa pubertas”.⁴

Definisi lain menyatakan bahwa anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.23 tahun 2002). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).⁵

Masa anak ditandai oleh proses tumbuh kembang, yang meliputi aspek fisik, biologis serta mental, emosional dan psikososial. Seperti yang telah dibahas diatas, UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

⁴Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, h. 83.

⁵Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 5.

B. *Klasifikasi Eksploitasi Seksual pada Anak menurut UU Perlindungan Anak*

Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup sehari-hari, sampai saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata secara pasti. Pekerja anak tersebut baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Pekerja anak di daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga. Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri rumahan atau industri keluarga) maupun di jalanan seperti penjual koran, penyemir sepatu, pengamen dan pengemis, pemulung bahkan sebagai pelacur dan pengedar narkoba. Beberapa diantara pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak.⁶

Eksploitasi Seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli

⁶ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 98.

jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut meliputi:

- a. Prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
- b. Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan saran apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau secara representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

C. *Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual pada Anak menurut UU Perlindungan Anak*

Moeljatno dalam Adami Chazawi menggunakan istilah perbuatan hukum, yang mendefinisikan perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁷ Beliau pun mengatakan bahwa perbuatan itu harus pula didasarkan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno untuk dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;

⁷Adami Chazawi, *PELAJARAN HUKUM PIDANA I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, h. 71.

- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat.⁸

Dalam hukum pidana Indonesia bentuk hukum yang akan diterima pelaku kejahatan bisa bermacam-macam tergantung dari jenis perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 10 KUHPidana, sanksi hukum itu berupa:

- a. Pidana pokok terdiri dari :
 - 1. Pidana mati,
 - 2. Pidana penjara,
 - 3. Kurungan,
 - 4. Denda.
- b. Pidana tambahan terdiri dari :
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 - 3. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi hukum yang akan diterima pelaku kejahatan seksual sangat beragam. Misalnya dalam UU Perlindungan Anak Pasal 82 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

⁸Edrianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: PT. Refika Aditama, 2011), h. 98.

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan pasal 82 diatas, dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut diatas secara sengaja maka di penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual pada anak secara langsung. Namun, pemberian sanksi hukum itu tidak hanya menimpa pelaku kejahatan seksual saja akan tetapi orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lain serta orang yang mengetahui dan secara sengaja membiarkan anak tereksplotasi secara seksual akan diberikan sanksi pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam pasal 78 UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa: Setiap orang yang mengetahui dan dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,

anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 78 UU Perlindungan Anak diatas, sanksi hukumnya di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00. (seratus juta rupiah) apabila orang itu mengetahui dan secara sengaja membiarkan atau tidak memberi pertolongan kepada anak yang tereksplorasi secara seksual.

Selain dalam UU Perlindungan Anak, KUHPidana pun menjelaskan sanksi-sanksi hukum yang berkaitan dengan kesusilaan. Adapun sanksi hukum dalam Pidana Nasional diantaranya:

- a. Perkosaan yang dikenakan sanksi pidana penjara selama dua belas tahun, (Pasal 285 KUHP),
- b. Bersetubuh dengan wanita pingsan diluar perkawinan, dikenakan sanksi pidana penjara selama sembilan tahun (Pasal 286 KUHP),
- c. Bersetubuh dengan seseorang yang masih di bawah umur yang dikenakan sanksi pidana penjara selama sembilan tahun (Pasal 287 KUHP),
- d. Membujuk orang yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan orang lain yang dikenakan sanksi pidana penjara selama empat tahun, jika mengakibatkan luka-luka dipidana penjara selama empat tahun, jika

mengakibatkan kematian maka dijatuhkan pidana penjara selama dua belas tahun, (Pasal 288 KUHP),

- e. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka dijatuhkan hukuman pidana penjara selama dua belas tahun, (Pasal 289 KUHP),
- f. Bersetubuh dengan anak dibawah umur dari jenis kelamin yang sama dikenakan sanksi lima tahun (Pasal 292 KUHP),
- g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan dikenakan sanksi tujuh tahun (Pasal 284 KUHP),
- h. Memudahkan anak untuk berbuat cabul dikenakan sanksi pidana penjara selama empat tahun (Pasal 295 KUHP).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi seksual pada anak dan bagi mucikari hanya mencakup pada pidana pokok saja, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sanksi hukumnya baik itu sanksi pidana denda atau pidana penjara sangat beragam tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

D. *Hak-hak Asasi Anak menurut UU Perlindungan Anak*

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak

boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila Ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri adalah suatu aktualisasi dari potensi manusia seperti yang terdapat pada individu dan komunitasnya. Hak asasi manusia adalah hak dari setiap manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya. Hukum positif adalah pranata sosial yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia. Pembangunan adalah dasar dari hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah dasar dari hukum positif. Penegak hukum digunakan secara efektif, bila ada pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan atau pembangunan yang dilaksanakan telah bertentangan dengan hak asasi manusia. Manusia atau anak telah

dirampas hak asasinya dengan digunakan sebagai alat pembangunan untuk kepentingan dirinya tau kelompok yang berkuasa.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak di banyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksplorasi, buta huruf, kelaparan dan ketelantaran. Anak kondisi tersebut tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut secara efektif untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu masyarakat Internasional mendesak kepada semua negara/ pemerintahan untuk mensahkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka. Sesuai dengan konvensi tentang hak anak (CRC) telah diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya. Anak berhak atas hak dan kebebasan yang sama dengan orang dewasa. Hak-hak fundamental tertentu, seperti hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi dan hak berkumpul secara damai dan berserikat dengan tegas diulangi dalam konvensi. Sebagai tambahan konvensi berusaha memberikan tambahan perlindungan terhadap

penyalahgunaan penelantaran dan eksploitasi anak (CRC, pasal 32 sampai pasal 36). ICRC juga menetapkan alasan dan kondisi-kondisi yang mendasari dapat dicabutnya kebebasan mereka sah serta hak anak yang didakwa telah melakukan pelanggaran hukum pidana (CRC, pasal 37 dan pasal 40). CRC merupakan traktat. Oleh karena itu menimbulkan kewajiban mengikat menurut hukum bagi negara-negara anggota untuk menjamin bahwa ketentuannya dilaksanakan sepenuhnya pada tataran nasional. Tindakan yang diambil untuk tujuan ini dapat meliputi penerimaan perundang-undangan yang berlaku mengenai anak atau penerimaan perundang-undangan baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan di dalam konvensi.⁹

Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan kepada apa itu kebaikan dan dalam hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan pada apa yang seharusnya dilakukan.

Anak merupakan generasi penerus masa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Untuk itu, penting bagi kita mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak-hak anak.

⁹ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 12.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa kecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia anak. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan.

Terlebih pada pemerluan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan di cantumkannya hak anak tersebut dalam batang

tubuh konstitusi, maka bisa di artikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus di jabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Di dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Lebih lanjut peraturan hak-hak anak di indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan konveksi Hak-hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua , keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konveksi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan peratifikasian Konveksi Hak-Hak Anak berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konveksi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Menurut Erna Sofyan Syukrie, Negara-negara pihak (yang telah meratifikasi KHA) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum.

- a) Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya.
- b) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konveksi Hak Anak.
- c) Mengusulkan langkah bagian pintas penyelerasan ketentuan konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.
- d) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
- e) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konveksi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.¹⁰

Maka sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah disebutkan di atas, juga dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right Of Life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:
 - 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.

¹⁰M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, h. 12.

- 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
 - 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (abuse);
 - 4) Hak anak-anak penyandang cacat (disable) untuk memperoleh pengasuh, pendidikan, dan latihan khusus;
 - 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;
 - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib ;
 - 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
 - 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
 - 9) Kewajiban negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculik anak.
- b) Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, antara lain:

- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
 - 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan hidup, dan penahanan semena-mena.
- c) Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standart of living). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:
- 1) Hak untuk memperoleh informasi (the rights to information);
 - 2) Hak memperoleh pendidikan (the rights to education);
 - 3) Hak bermain dan rekreasi (the rights to play and recreation);
 - 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights to participation in cultural activities);

- 5) Hak untuk kebebasan berpikir (conscience), dan beragama (the rights to thought and religion);
 - 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (the rights to personality development);
 - 7) Hak untuk memperoleh identitas (the rights to identity);
 - 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (the rights to health and physical development)
 - 9) Hak untuk didengar pendapatnya (the rights to be heard);
 - 10) Hak untuk/atas keluarga (the rights to family).
- d) Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain.
- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
 - 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
 - 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;

- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

- 7) Bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusialaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik untuk anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

- 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹¹

¹¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, h. 16.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

A. *Pengertian Eksploitasi Seksual pada Anak menurut Hukum Islam*

Pengertian eksploitasi dalam hukum Islam tidak ada pengkajian yang khusus, hanya saja jika melihat dari berbagai pengertian yang telah diungkapkan diatas bahwa pengertian eksploitasi itu adalah memanfaatkan tenaga seseorang secara berlebihan untuk keuntungan diri sendiri baik yang bersifat materiil atau non materiil.

Sedangkan pengertian seks adalah upaya untuk reproduksi lantaran kebutuhan akan keberlangsungan spesies (khususnya manusia). Dan pengertian anak dalam hukum Islam sangat beragam definisinya, diantaranya Undang-undang Perkawinan menyebutkan batasan umur anak apabila telah mencapai umur 18 tahun, atau sudah menikah meskipun di bawah umur 18 tahun.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batasan usia dewasa yang mewajibkan orang tua untuk melakukan pemeliharaan yakni pada Pasal 98 ayat (1) yang menentukan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 16

Batasan umur anak yang terdapat dalam KHI tidak ada perbedaan dengan UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dari hikmah penciptaan manusia, Islam memandang anak sebagai sesuatu yang mempunyai kedudukan mulia, sebagai makhluk Allah yang sedang menjalani perkembangan ke arah abdi yang saleh.

Hukum Islam juga dikenal istilah “*balig*”. *Balig* menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balig diambil dari bahasa Arab yang secara bahasa mengandung arti “sampai”, maksudnya “telah sampainya umur seseorang pada tahap kedewasaan.”² Dalam hal ini Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balig, sedangkan dengan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balig apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.³ Adapun seorang perempuan dikatakan balig jika sudah menstruasi dan seorang laki-laki dikatakan balig jika sudah pernah mengalami mimpi basah. Nyatanya sangat sulit menentukan dan memastikan pada umur berapa laki-laki mengalami mimpi basah.

Kemudian menurut pendapat Imam Syafi’i sebagaimana yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawandi dalam bukunya hukum perjanjian dan Hukum islam, seorang anak dikatakan dewasa apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang

²Lihat Ade Maman Suherman, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur “Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Batasan Umur”* (Jakarta: NLRP, 2010), h.50.

³A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 369.

sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.⁴

Berdasarkan uraian diatas bahwa batasan umur anak yang dianggap telah dewasa adalah sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak pria maupun wanita, yang disebut sebagai akil baligh dalam melaksanakan penanggungjawabannya.

Berbeda dengan hukum adat bahwa tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian Soepomo tentang Hukum Perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang dapat diukur dari segi:

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri);
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri;
4. Telah menikah;
5. Berusia 21 tahun.

Selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi, batasan umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.

⁴Chairuman Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 10.

Seperti telah dijelaskan di atas, hukum adat tidak mengenal ukuran umur. Apabila seorang anak telah matang pikirannya, atau telah cukup kuat tenaga badannya untuk mencari nafkah sendiri, atau sudah matang untuk dapat hidup bersama dengan anggota jenis kelamin lain, maka ia dianggap telah dewasa.

Ada pula batasan kedewasaan seseorang berdasarkan KUH Perdata Pasal 330 bahwa anak adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Apabila kawin sebelum berumur 21 tahun dan perkawinan terputus sebelum mencapai umur 21 tahun, mereka tetap dianggap sudah dewasa.

Uraian diatas, nampak ada perbedaan pendapat dalam menentukan batas maksimal umur anak sehingga ada kesan terjadi pengelompokan pengertian anak.

Berhubung pengelompokan pengertian eksploitasi seksual pada anak memiliki aspek yang sangat luas. Karena dapat diterjemahkan untuk mendekati eksploitasi seksual pada anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial, dari masing-masing bidang pengertian anak di berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna dan tujuannya maka pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian eksploitasi seksual pada anak menurut sistem kepentingan hukum dan agama yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak, KHI, dan Hukum Islam yaitu maksimal berumur 21 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, pengertian eksploitasi seksual pada anak adalah tindakan yang dilakukan secara berlebihan untuk mengeruk keuntungan diri

sendiri dengan mempekerjakan anak di bawah umur 21 tahun sebagai pekerja seks.

B. *Klasifikasi Eksploitasi Seksual pada Anak menurut Hukum Islam*

Bentuk-bentuk eksploitasi seksual menurut hukum Islam salah satu diantaranya adalah melakukan perbuatan sodomi. Selain prostitusi, ada juga pelayanan seks konvensional, oral, dan anal. Anak-anak laki-laki harus bisa berprofesi sebagai homo dan hetero karena layanan-layanan khusus, dan hal ini memiliki resiko yang tinggi bagi kesehatan mereka. Tidak hanya itu, korban pun pernah mengalami pengalaman kekerasan fisik sebanyak 25 % dilakukan oleh mucikari dan 16 % oleh pelanggan.

Kasus sodomi yang dilakukan oleh penderita pedhophilia juga telah terjadi, bahkan dalam hitungan per hari kasus ini banyak/sering diberitakan melalui media massa, umumnya terjadi pada anak-anak dengan sedikit iming-iming yang sudah cukup efektif untuk menutup perbuatannya.

Seorang homo melakukan hubungan seksual dengan cara sodomi atau *liwath*. Istilah ini diambil dari kisah pada Zaman Nabi Luth yang kaumnya suka melakukan hubungan abnormal ini, yaitu dengan cara memasukkan penis ke dalam anus teman kencannya. Islam dengan tegas melarang perbuatan tersebut dan menyamakannya dengan Zina.

Homoseksual dapat berpengaruh pada perkembangan jiwa, daya pikir, dan akhlak. Sayid Sabiq menerangkan hal itu dalam *Fiqh Sunnah*:

1. *Pengaruh Homoseksual terhadap Jiwa*

Perbuatan homoseks dapat merusak jiwa. Seorang homo akan bertindak sebagai seorang wanita, sementara raganya pria. Ketidaksesuaian ini akan menimbulkan efek psikologis yang besar sehingga jiwanya terganggu. Dia kemudian mendandani dirinya seperti kaum wanita dan menganggap pasangannya seorang pria. Padahal keduanya pria sehingga melakukan lewat anus.

2. *Pengaruh Homoseksual terhadap Daya Pikir*

Seorang pengidap homo bisa menderita lemah syahwat yang diikuti dengan lemah mental, seperti mudah tersinggung dan malas bermasyarakat. Akhirnya dia tidak bisa berfikir dengan jernih dan aktivitasnya lebih banyak dipengaruhi oleh emosi.

3. *Hubungan Homoseksual dengan Akhlak*

Pengidap homoseksual pasti bertabiat jelek, karena tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Akal sehatnya sebagai orang normal sudah tidak ada lagi. Pikirannya lebih diisi oleh pemuasan nafsu melalui hubungan sejenis. Dengan nafsunya itu mereka tega melakukan perbuatan maksiat dengan anak-anak, seperti yang kita dengar beritanya.

C. *Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual pada Anak menurut Hukum Islam*

Pembahasan Eksploitasi Seksual pada Anak dapat dikategorikan atau diserupakan dengan perbuatan zina, karena unsur-unsur yang terdapat pada Eksploitasi Seksual serupa atau hampir serupa dengan zina sehingga

hukumannya pun disesuaikan dengan sanksi hukum yang terdapat dalam sanksi jarimah zina.

Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi hukum yang akan diterima si pelaku bermacam-macam, secara umum terbagi kepada tiga bagian yakni:

- 1) Sanksi Hukum Had, bisa berbentuk hukuman cambuk (dera atau jilid), rajam, pengasingan, potong tangan, dan lain-lain;
- 2) Sanksi hukum Qishash berbentuk hukum balas kematian atau pelukaan, dan
- 3) Sanksi Hukum Ta'zir yang tidak ditentukan jenis dan bentuk hukumannya secara pasti dan rinci dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Hukumannya diserahkan kepada hakim (negara).⁵

Berdasarkan macam-macam sanksi hukum diatas, dapat pula disimpulkan bahwa sanksi hukum bagi pezina berdasarkan ayat Al-Qur'an dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sanksi hukum bagi wanita dan/atau laki-laki yang berstatus pemuda dan/atau pemuda adalah hukuman cambuk seratus kali.
- 2) Dalam pelaksanaan cambuk tidak ada belas kasihan kepada pelaku zina serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
- 3) Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina pada poin satu diatas, tidak boleh ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu akan menjalankan hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari

⁵ Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 11

kiamat. Sanksi hukum bagi wanita atau laki-laki yang berstatus janda atau duda dalam hukuman rajam (ditanaman sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal). Dalam pelaksanaan hukuman rajam tidak ada belas kasihan kepada pelaku zina serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.⁶

Secara rinci, sanksi hukum bagi pelaku zina baik pria maupun wanita diancam dengan hukuman had berupa hukum cambuk atau rajam tergantung status pelakunya apakah masih lajang (perawan atau jejaka) atau sudah menikah (dalam hukum islam dikenal dengan zina muhshan ataupun ghairu muhshan). Zina muhshan yaitu orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah campur dengan jalan yang sah. Hukumannya terhadap muhshan rajam (dilontar dengan batu yang sederhana sampai mati).

Zina Ghairu Muhshan (yang tidak termasuk syarat-syarat di atas) seperti gadis dengan bujang, hukumannya terhadap mereka dipukul seratus kali dan dibuang keluar negeri satu tahun lamanya. Hukuman ini didasarkan pada QS an-Nur/24: 2, yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan

⁶ Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 50

*akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.*⁷

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa eksploitasi seksual pada anak diserupakan dengan perbuatan zina namun harus dilihat per kasus, karena orang yang mengeksploitasi seksual pada anak bisa menggunakan cara seperti memasukkan kelamin ke dalam vagina, menyodomi lewat dubur, memeluk dan meraba-raba saja atau hanya mencicipi uang hasil pelacuran anak tersebut.

Untuk kasus yang memasukkan alat kelamin kedalam vagina dapat diancam dengan hukum rajam atau cambuk sebanyak 100 (seratus) kali. Untuk kasus sodomi, dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Maliki dan Ahmad menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku sodomi adalah rajam sampai mati baik pelakunya muhsan atau ghairu muhsan. Sementara untuk Syafi'i, hukumannya sama seperti hukuman untuk zina, yaitu kalau ia muhsan dihukum rajam dan jika ghairu muhsan dihukum dera 100 (seratus) kali.⁸ Sedangkan untuk kasus lainnya seperti memeluk, meraba atau mengambil uang hasil pelacuran anak tersebut (mucikari) dalam aturan hukum Islam perbuatan tersebut dilarang.

Karena seburuk-buruknya usaha adalah mengambil keuntungan dari hasil perzinaan (mucikari), hanya saja sanksi hukum bagi seorang mucikari tidak dibahas khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka sanksi hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadist dikenakan sanksi hukum

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h.488.

⁸Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 25.

tertentu yang dirumuskan oleh hakim (negara), sanksi hukumnya jatuh kepada sanksi hukum ta'zir yang ditetapkan oleh hakim (Negara).

D. Hak-hak Asasi Anak menurut Hukum Islam

Dalam Islam menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak asasi pokok semata-mata karena dirinya manusia, untuk itu setiap muslim wajib untuk mengakui hak-hak ini, yaitu:

1) Hak untuk Hidup

Hak asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup. Al-Qur'an dalam QS al-Maidah/5: 32 menegaskan sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁹

Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h.149

berwenang. Selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam setiap peristiwa itu, tidak ada satu individu pun yang memiliki hak untuk mengadili secara main hakim sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh QS al-An'am/6: 151 yaitu:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَوْاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝١٥١﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).¹⁰

Dengan demikian pembunuhan dibedakan dari menghilangkan nyawa yang dilakukan demi melaksanakan tuntutan keadilan. Rasulullah saw. telah menyatakan pembunuhan sebagai dosa paling besar setelah menyekutukan Tuhan.

Dalam semua ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi ini kata "jiwa" (*nafs*) dipakai dalam arti luas tanpa ada petunjuk bahwa orang-orang yang tidak

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h.199.

boleh dibunuh itu termasuk salah satu bangsa atau rakyat dari ras atau agama tertentu. Perintah itu berlaku terhadap semua umat manusia.

“Hak untuk Hidup” yang diberikan kepada segenap umat manusia hanya diberikan oleh Islam. Anda bisa saksikan bahwa aturan-aturan yang memuat hak-hak asasi manusia dalam konstitusi-konstitusi atau deklarasi-deklarasi di banyak negara dengan jelas menyatakan hanya berlaku bagi warga negara yang bersangkutan atau terhadap ras kulit putih saja. Sebagai contoh, manusia diburu seperti hewan di Australia dan tanah dibersihkan dari suku bangsa Aborising demi kepentingan orang-orang kulit putih. Demikian pula, penduduk kulit merah Indian yang masih bisa bertahan hidup dari pemusnahan (*genocide*) ini diasingkan ke tempat-tempat reservasi. Di Afrika manusia juga diburu seakan-akan mereka ini binatang liar. Sebaliknya dari konsep hak asasi yang parsial ini, Islam mengakui hak-hak tersebut bagi segenap umat manusia.

2) Hak atas Keselamatan Hidup

Setelah ayat dalam Al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas sehubungan dengan hak untuk hidup, Tuhan mengatakan dalam QS al-Maidah/5: 32 yaitu :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا

أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.¹¹

Ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari kematian. Apabila seseorang sedang sakit atau menderita luka-luka maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menolongnya memperoleh bantuan medis. Apabila ia hampir mati karena kelaparan, maka kewajiban kitalah untuk memberinya makanan. Apabila ia tenggelam maka tugas kita menyelamatkannya. Kita melihatnya sebagai kewajiban untuk menyelamatkan hidup setiap manusia, karena itulah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an.

3) Penghormatan terhadap Kesucian Kaum Wanita

Unsur ketiga dalam Piagam Hak-hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Islam adalah bahwa kesucian seorang wanita harus dihormati dan dilindungi setiap saat, baik apabila ia sebangsa dengan kita atau termasuk bangsa musuh, baik ia kita temukan di dalam hutan belantara atau di

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h.149.

sebuah kota yang ditaklukkan, baik ia seagama dengan kita atau penganut agama lain atau sama sekali ia tidak beragama. Seorang muslim tidak dibolehkan menyiksanya secara fisik dalam keadaan apa pun. Segala bentuk hubungan bebas pria-wanita terlarang baginya, tanpa melihat pada status atau kedudukan wanita ataupun si wanita itu sendiri mau melakukan perbuatan itu.

Kata-kata Al-Qur'an berkenaan dengan hal ini adalah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

Terjemah:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (17:32).*¹²

Hukuman berat telah ditetapkan terhadap kejahatan ini, dan tidak ada disebutkan tentang suatu keadaan yang bisa meringankannya. Karena pelanggaran kesucian wanita itu dilarang dalam Islam, maka seorang Muslim yang melakukan pelanggaran ini tidak bisa melarikan diri dari hukuman, baik selama ia masih berada di atas dunia maupun di alam akhirat.

Konsep sanksi terhadap kesucian dan perlindungan terhadap kaum wanita ini tidak dapat dijumpai di mana pun kecuali dalam Islam. Tentara dari negara-negara Barat memerlukan kaum wanita bangsanya sendiri guna memuaskan nafsu mereka kendatipun di negerinya sendiri, dan kalau saja mereka menduduki negeri lain, cuma bisa dibayangkan bagaimana nasib kaum wanita setempat.

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h.388.

Tetapi sejarah kaum Muslim, kecuali kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh individu, bersih dari pelanggaran terhadap kaum wanita ini. Tidak pernah terjadi bahwa setelah penaklukan sebuah negeri asing tentara Muslim melakukan perkosaan atas kaum wanita dari rakyat yang ditaklukkannya, atau di negara mereka sendiri, pemerintah telah menyediakan para pelacur untuk memuaskan mereka.

4) Hak untuk Memperoleh Kebutuhan Hidup Pokok

Berbicara tentang hak-hak ekonomi, QS az-Zariyat/51: 19 memerintahkan pengikutnya:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*¹³

Kalimat dalam perintah ini menunjukkan hal yang pasti dan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, perintah ini diberikan di kota Mekah di mana saat itu tidak terdapat suatu masyarakat Muslim dan di mana kaum Muslim lebih banyak berhubungan dengan kaum kafir.

Arti yang jelas dari ayat ini adalah bahwa siapapun yang meminta pertolongan dari siapa pun yang menderita kesusahan mempunyai hak atas bagian harta benda dan kekayaan seorang Muslim; tanpa melihat apakah ia berasal dari bangsa ini atau itu, dari negara mana pun dan dari ras apa pun ia berasal. Apabila seseorang dapat memberikan bantuan dan seorang miskin memohon bantuan atau apabila seseorang mengetahui bahwa ada

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h.753.

orang yang kesusahan, maka menjadi kewajibannyalah untuk memberikan pertolongan terhadap orang itu.

5) Hak Individu atas Kebebasan

Islam secara tegas melarang praktek primitif penangkapan orang yang merdeka untuk dijadikan hamba sahaya atau budak atau untuk diperjualbelikan sebagai hamba sahaya. Tentang hal ini secara tegas Nabi saw. mengatakan sebagai berikut: "Ada tiga kategori manusia yang aku sendiri akan menggugatnya pada Hari Kiamat. Dari ketiganya ini, salah satu adalah mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya, lalu menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya".

Kata-kata dari Rasul tersebut tidak menunjuk atau membatasi terhadap satu bangsa tertentu atau ras tertentu, atau terhadap penganut agama tertentu. Bangsa Eropa dengan bangganya menyatakan bahwa mereka telah menghapuskan perbudakan dari muka bumi, meskipun mereka baru menganggapnya sebagai perbuatan mulia pada pertengahan abad yang lalu. Sebelum masa itu, negara-negara Barat telah menyerbu Afrika dengan kekuatan besar, menangkap orang-orang merdeka, menempatkan mereka sebagai budak dan mengangkut mereka ke koloni-koloni baru miliknya. Perlakuan yang diberikan terhadap orang-orang yang malang ini lebih buruk daripada perlakuan terhadap binatang. Buku-buku yang ditulis di Barat sendiri memberikan kesaksian terhadap fakta ini.¹⁴

¹⁴Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 12.

Dalam ajaran Islam juga, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.¹⁵

Ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak dalam islam, antara lain:

- a) Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan QS ath-Thalaq/65: 6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسِئَرَضِعْ لَهُ
أُخْرَى ۖ

Terjemahnya:

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*¹⁶

¹⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 17.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h.817.

- b) Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan QS an-Nahl/16: 58-59, yaitu:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

(58) Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. (59) Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.¹⁷

- c) Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan QS al-Isra/17: 31, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.¹⁸

- d) Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni “Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?” Nabi Saw menjawab, “Memberinya

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h.372.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h. 388.

nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.

- e) Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan di atas dan hadis yang berbunyi: “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.
- f) Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan juga hadits yang telah disebutkan diatas.
- g) Hak anak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu), hal ini terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 233, yaitu:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang

*lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁹

h) Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan Hadis Riwayat Baihaqi: "Seorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya".

i) Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan Hadis Bukhari, yakni "Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fithrah Islami). Ayah dan Ibunya kelak yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi." HR Bukhary: 1100;243/15. Dalam hadis lain juga diungkap "Barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga".²⁰

Sementara itu, Mukhoiruddin membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain:

- a) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*)
- b) Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzun nafs*)
- c) Pemeliharaan atas akal (*hifzul aql*)
- d) Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal;*)
- e) Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzul 'ird*).²¹

Dari berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h.47.

²⁰M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, h. 19.

²¹<http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170488-hak-anak-menurut-islam/#ixzz1zSXacwvM>.

semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu juga, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, "*Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,*" dan untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi juga bersabda "Ibu adalah tiang negara" sebab dari Ibu yang mampu mendidiklah, lahir para pemimpin muda yang tangguh.

Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.

BAB IV

ANALISIS TINDAKAN KRIMINAL EKSPLOITASI SEKSUAL PADA

ANAK MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM

ISLAM

A. Tindakan Kriminal Eksploitasi Seksual pada Anak menurut UU Perlindungan Anak

Berdasarkan uraian bab yang telah dibahas, seperti yang dikemukakan R. Susilo bahwa eksploitasi seksual akan menyangkut adanya suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan; adanya suatu perbuatan keji; serta perbuatan itu berkaitan dengan lingkungan nafsu birahi.

Berdasarkan laporan hasil dari Jurnal Perempuan, tindakan eksploitasi seksual pada anak yang sering terjadi di masyarakat adalah:

1. Membujuk anak perempuan dengan diiming-imingi gaji yang besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual;
2. Kekerasan seksual, dalam bentuk perkosaan;
3. Memaksa anak laki-lakinya untuk melakukan sodomi;
4. Membujuk anak-anak untuk dijadikan pekerja seksual sebagai mata pencaharian, dan lain-lain.
5. Pelaku mendekati anak perempuan, memacarinya, lalu memperdayai agar mau menyerahkan keperawanannya setelah itu dijual ke germo.¹

¹Adriana Venny, *Jurnal Perempuan* 29, Jakarta: SMKG Desa Putera, 2003.

Sedangkan hasil laporan dari Baihaqi dalam buku *Anak Indonesia Teraniaya*, tindakan eksploitasi seksual pada anak yang sering terjadi di masyarakat adalah:

1. Menjual anak kandung kepada geromo untuk dijadikan pekerja seksual;
2. Membujuk anak kandung untuk melakukan persetubuhan.

Melihat tindakan-tindakan tersebut di atas maka tindakan tersebut dapat digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang besar;
2. Kekerasan seksual;
3. Memaksa anak untuk melakukan sodomi;
4. Memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubungan seksual dan kemudian dijual kepada geromo, dan
5. Membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual.²

Di dalam Pasal 82 dijelaskan bahwa perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika melihat pasal diatas, nampaknya membujuk anak perempuan dengan diming-imingi gaji besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual termasuk melakukan tipu muslihat atau kebohongan terhadap orang lain, dalam hal ini anak perempuan, sehingga orang yang melakukan tindakan tersebut akan ditindak pidana. Dengan demikian, perbuatan itu termasuk kepada tindakan kriminal.

²Esthi Susanti Hudiono, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual - Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil* (Surabaya: Yayasan Hotline Surabaya, 2014), h. 129

Begitu pula dengan perbuatan kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan termasuk melanggar Pasal 82 di atas.

Tindakan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan (kelompok pertama), kekerasan seksual baik dalam bentuk perkosaan atau sodomi (kelompok kedua dan ketiga) tidak hanya melanggar UU Perlindungan Anak Pasal 82 saja tetapi melanggar UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) yaitu “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara dan denda”.

Pada kasus kelompok keempat yakni memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubungan seksual dan kemudian dijual kepada geromo telah melanggar Pasal 81 ayat (1) yang dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 yang telah dijelaskan sebelumnya, juga melanggar Pasal 83 dan Pasal 88 yang menyatakan “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara dan denda” atau “Setiap orang yang mengeksploitasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara dan denda”. Sementara untuk kasus kelompok kelima yaitu membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual, maka tindakan tersebut melanggar UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) sebagaimana yang diterangkan pada pasal di atas.

Sedangkan menurut KUH Pidana Pasal 293 ayat (1) dijelaskan bahwa barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan kekuasaan yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, maka diancam dengan pidana penjara. Melihat pasal di atas, nampaknya membujuk anak perempuan dengan diming-imingi gaji besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual (kelompok pertama) termasuk perbuatan yang melakukan kebohongan atau tipu muslihat pada anak perempuan dengan menjanjikan berupa uang. Maka orang yang melakukan tindakan ini akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, perbuatan itu termasuk tindakan kriminal.

Selain mengiming-imingi gaji besar pada anak padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual, kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan (kelompok kedua) juga melanggar Pasal 285, 289 KUH Pidana yakni, “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan maka diancam dengan pidana penjara” atau “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, maka diancam dengan pidana penjara”. Dalam kedua pasal tersebut dikatakan bahwa apabila

memaksa wanita dengan kekerasan untuk melakukan persetubuhan, seperti merangkul wanita sedemikian keras, sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi termasuk sebagai tindakan kriminal.

Pada kasus kelompok ketiga yaitu memaksa anak melakukan sodomi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 292 KUH Pidana yaitu “orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, maka diancam dengan pidana penjara, dikategorikan sebagai tindakan kriminal pula karena telah melanggar KUH Pidana Pasal 292 di atas.

Sementara pada kasus keempat, yaitu memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubungan seksual lalu dijual ke germo, telah melanggar Pasal 287 ayat (1). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara”. Tindakan tersebut juga melanggar Pasal 289 yang telah dijelaskan sebelumnya serta Pasal 290 ayat (2) dan (3) yaitu “barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin dan barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain” atau

melanggar Pasal 296 dan Pasal 297 yaitu “barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara” serta “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara”.

Pada tindak eksploitasi seksual kelima yakni membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual telah melanggar Pasal 290 ayat (3) KUH Pidana dan Pasal 293 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.

Berdasarkan uraian diatas, nampaknya UU Perlindungan Anak begitu pula KUH Pidana memasukkan seluruh tindakan yang dilaporkan dalam Jurnal Perempuan atau Baihaqi termasuk kepada tindak kriminal yang harus mendapatkan sanksi.

B. *Tindakan Kriminal Eksploitasi Seksual pada Anak menurut Hukum Islam*

Menurut hukum Islam sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, tindakan-tindakan yang telah dibahas diatas ada yang termasuk kepada tindakan kriminal seperti melakukan hubungan seksual di luar nikah dan melakukan sodomi, sementara tindakan lainnya harus ditelusuri lagi apakah termasuk kepada tindakan kriminal atau tidak.

Pada kelompok pertama, perbuatan membujuk anak dengan mengiming-imingi gaji besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, karena termasuk

pada penipuan. Dalam QS al-Maidah/5: 1 dinyatakan bahwa setiap akad harus ditunaikan oleh *akid* (pembuat akad)nya. Ayat tersebut adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Maksudnya yaitu melaksanakan tuntutan janji yang dilihat, yang diserupakan dengan ikatan tali dan sebagainya dan mencakup segala perkara yang telah ditetapkan Allah swt kepada hamba-hamba Nya, berupa kewajiban, hukum-hukum agama serta ikatan-ikatan di antara mereka berupa akad, amanat, muamalat dan sebagainya wajib dipenuhi.

Apabila dilihat dari kaidah ushul fiqih, memenuhi janji yang diperintahkan dalam ayat tersebut adalah wajib, karena ada kaidah yang menyatakan bahwa pokok dalam perintah adalah wajib. Oleh sebab itu, ucapan akad harus direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata termasuk didalamnya perbuatan yang menjanjikan seseorang akan diberi pekerjaan harus direalisasikan sesuai dengan ucapan janjinya.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h.141.

Apabila ada seseorang yang membujuk anak dengan diiming-imingi gaji besar, padahal dalam kenyataannya akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual berarti dia telah melakukan kebohongan dan penipuan.

Berdasarkan uraian diatas, tindakan berbohong atau menipu termasuk perbuatan dosa yang diancam dengan siksa neraka. Hal ini tidak menyebutkan sanksi kongkrit di dunia, namun bila tindakan tersebut diindikasikan akan merugikan pihak orang lain, dalam hal ini anak perempuan atau masyarakat pada umumnya karena akan dijadikan sebagai pekerja seksual, nampaknya tindakan berbohong dan menipu tersebut harus diancam dengan hukuman tertentu supaya jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.⁴ Kalau melihat jenis-jenis tindakan pidana Islam yang telah dibahas pada bab sebelumnya, baik perbuatan berbohong atau menipu tidak termasuk kepada tindakan pidana yang menyebabkan timbulnya sanksi pidana *had* atau *qishash*. Namun kalau melihat peluang yang diisyaratkan dalam hukum pidana Islam seperti adanya jarimah *ta'zir*, nampaknya perbuatan tersebut, khususnya yang menyangkut tindakan-tindakan pada kelompok pertama di atas dapat dimasukkan kepada tindak pidana *ta'zir*.

Adapun kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan dapat dikategorikan kepada dua macam tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam, tindak kekerasan termasuk kepada jarimah *qishash al-jarh al-amd* (tindak pelanggaran secara sengaja), sementara perkosaannya bisa dikategorikan kepada jarimah

⁴Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 71.

zina sebab tindak perkosaan adalah memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk melakukan hubungan seks dengannya.⁵

Tindak perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan perbuatan yang sangat merugikan individu korban dan masyarakat apalagi dilakukan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan keperawanannya hilang dan kesuciannya ternoda serta merusak jiwa dan masa depannya sehingga perbuatan ini termasuk pada tindakan kriminal yang patut dikenakan hukuman seberat-beratnya.

Mengenai tindak kekerasannya, berhubung kasusnya mengarah kepada perkosaan, maka sanksi qishashnya bukan dengan melakukan hukum balas yang sama dengan perbuatan yang diterima oleh korban sebab kekerasan yang mengarah pada perkosaan dikhawatirkan termasuk kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinaan, padahal dalam QS al-Isra/17: 32 ditegaskan bahwa mendekati perbuatan zina sangat dilarang.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*⁶

Oleh karena itu, hukumannya bisa diganti dengan hukuman lain yang membayar sejumlah diyat yang ditentukan oleh hakim besar atau kecilnya sebagai pembayar ganti rugi yang diderita korban.

Pada kasus kelompok ketiga, yaitu melakukan perbuatan sodomi. Perbuatan sodomi merupakan perilaku seks yang menyimpang yang

⁵Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, h. 37.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h.388.

dilakukan dengan sesama jenis untuk memuaskan nafsu birahi dengan memasukkan alat kelamin melalui dubur. Dalam hukum Islam, sodomi merupakan perbuatan dosa besar.

Pelaku perbuatan sodomi harus dihukum baik dengan sanksi hukum di dunia seperti dibunuh atau sanksi hukum di akhirat seperti disiksa di neraka selama seribu tahun. Perbuatan sodomi termasuk kepada tindak kriminal, khususnya tindak pidana *had* karena hukumannya sudah ditentukan oleh Allah SWT. yakni membunuh pelaku sodomi baik yang berperan sebagai laki-laki ataupun sebagai wanita. Hanya dalam kasus sodomi di atas, berhubung ada salah satu pihak yang menjadi korban yaitu anak-anak kecil yang dipaksa melayani perbuatan tersebut, nampaknya yang diberi sanksi hanya orang yang memaksa orang lain untuk berbuat sodomi baik sudah menikah atau masih perjaka.

Sementara pada kasus kelompok keempat yakni memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubungan seksual dan kemudian dijual kepada germo dalam hukum pidana Islam bisa dikategorikan menjadi tiga bentuk tindakan kriminal, yaitu: pertama adalah tindakan memperdayai anak perempuan atau pacar, Kedua adalah melakukan hubungan seksual, Ketiga adalah menjual anak kepada germo untuk dijadikan sebagai pekerja seksual.

Dalam hukum pidana Islam, tindakan memperdayai anak termasuk kepada tindakan penipuan karena memperdayai seseorang berarti berusaha supaya mau menuruti kehendak yang memperdayainya, dengan diberi atau

diiming-imingi sesuatu agar anak mau melakukan hubungan seksual. Maka perbuatan ini sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya termasuk kepada tindakan kriminal.

Sedangkan bentuk yang kedua yaitu melakukan hubungan seksual. Dalam hukum pidana Islam, bahwa seseorang yang memasukkan penis ke dalam vagina yang bukan miliknya serta tidak ada unsur syubhat dinamakan telah melakukan perbuatan zina. Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁷ Maka, perbuatan ini dapat dikategorikan kepada perbuatan jarimah zina. Adapun bentuk yang ketiga yaitu menjual anak untuk kepentingan nafsu birahi bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam apalagi dimaksudkan untuk kepentingan nafsu birahi tanpa ikatan nikah.

Ajaran Islam memang mengenal istilah perbudakan, yang bisa diperjualbelikan atau dimiliki sendiri. Namun dalam ajaran Islam bukan dimaksudkan untuk melestarikan perbudakan tetapi hanya sebagai jalan untuk menghilangkan perbudakan yang sudah membudaya di masyarakat saat itu. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus antara lain sanksi hukum yang ditimpakan kepada pelanggar syar'i, ada berupa hukuman membebaskan hamba sahaya; atau jika hamba sahaya hamil oleh tuannya maka anaknya secara otomatis menjadi orang merdeka. Oleh karena itu, sekalipun istilah

⁷Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta Rineka Cipta, 1991), h. 31.

perbudakan dikenal dalam ajaran Islam akan tetapi bukan berarti melegitimasi perbuatan menjual seseorang apalagi status orang tersebut adalah orang merdeka (bukan hamba sahaya) yang mempunyai hak yang sama dengan orang merdeka lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, tindak penjualan seseorang bisa dikategorikan kepada tindak kriminal apalagi kalau dilihat dari tujuannya yang dimaksudkan untuk pemuas nafsu birahi seseorang. Penentuan masuk tidaknya kepada tindak kriminal ditentukan oleh keputusan hakim. Dengan demikian, tindak penjualan ini digolongkan kepada tindak jarimah ta'zir.

Kasus yang terakhir adalah membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual. Perbuatan membujuk anak agar mau melakukan hubungan seksual, merupakan perbuatan terlarang karena termasuk kepada perbuatan yang tercela. Upaya membujuk anak untuk mau melakukan hubungan seksual bertentangan dengan kandungan ayat QS ali Imran/3: 104, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.*⁸

Dalam isi ayat tersebut ditegaskan bahwa kita harus menjadi umat yang bisa mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari perbuatan yang munkar bukan menjadi umat sebaliknya yang mengajak kepada perbuatan munkar

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah*, h.79.

serta melarang berbuat baik. Apabila perbuatan tersebut akan mengganggu hak Allah dan hak si anak tersebut, nampaknya harus dimasukkan kepada upaya melakukan jarimah zina, yang hukumannya tidak dalam bentuk sanksi *had* karena belum melakukan perbuatan zina. Namun, jika berhasil membujuk anak untuk melakukan hubungan seks maka berdasarkan ayat tersebut harus diberi sanksi *had*, yakni dicambuk dan dirajam sampai meninggal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksploitasi seksual pada anak menurut UU Perlindungan Anak adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak dibawah umur dengan cara dipekerjakan sebagai pekerja seksual untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi kedua atau dalam hal ini inividu yang berperan sebagai korban eksploitasi. Sedangkan menurut Hukum Islam, Eksploitasi seksual pada anak tidak ada penegertian secara khusus, namun jika dilihat dari KHI adalah tindakan yang dilakukan secara berlebihan untuk mengeruk keuntungan diri sendiri baik yang bersifat materiil atau non materiil dengan mempekerjakan anak di bawah umur 21 tahun sebagai pekerja seks. Dan jika dilihat dari tindakannya yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, maka perbuatan ini digolongkan kedalam perbuatan keji dan perbuatan yang mengarah kepada jarimah perzinaan yakni melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan secara sengaja, yang bukan miliknya dan tidak ada syubhat.

2. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual yaitu hukuman penjara dan denda. Lamanya hukuman penjara sangat bervariasi tergantung kepada jenis tindakannya. Sanksi hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat adalah 3 (tiga) tahun. Begitu pula dengan hukuman denda, besar kecilnya tergantung dari tindak kriminalnya yang paling banyak adalah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit adalah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan menurut Hukum Islam, tindak pidana bagi mucikari dapat diancam dengan hukuman *ta'zir* dan pelaku eksploitasi seksual pada anak di bawah umur dapat diancam dengan hukuman *had* yakni jilid dan pengasingan berlaku bagi pelaku pezina *ghairu muhsan*, sedangkan hukuman bagi pelaku pezina *muhsan* berlaku hukum rajam dan apabila melakukan tindak pidana pelukaan secara sengaja maka pelaku menerima hukuman sesuai dengan apa yang diterima korban tidak boleh melebihi apa yang dilakukan pelaku terhadap korban, seperti yang terdapat dalam QS al-Maidah/5: 45; sanksi hukum *diyat* sebagai sanksi hukum/pengganti dari hukuman pokok (*qishash*) yang dimaafkan atau karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan; dan sanksi hukum *ta'zir* yang tergantung kepada jenis tindakan yang dilakukan si pelaku. Untuk sanksi hukum *ta'zir*, pelaksanaannya diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan

kualitas tindak pidana yang dilakukan, situasi kondisi pelaku dan motivasi yang mendorong terjadinya tindak pidana.

3. Tindakan Seksual pada Anak yang sering terjadi di masyarakat diantaranya; meniming-imingi pekerjaan dengan gaji yang besar, kekerasan seksual, memaksa anak untuk melakukan sodomi, memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubungan seksual dan kemudian dijual kepada germo, dan membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal karena melanggar UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2), Pasal 82, Pasal 83 serta Pasal 88. Sementara menurut Hukum Islam Tindakan eksploitasi seksual yang termasuk dalam tindak kriminal adalah seseorang melakukan ancaman kekerasan atau merayu anak di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual dan berhasil menggauli anak tersebut, karena melanggar QS al-Israa/17: 32.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa saran yang diajukan penulis kepada berbagai pihak yakni:

1. Orang tua harus mengawasi, memperhatikan, melindungi anak-anaknya dalam pergaulan masyarakat serta mengajarkan kepada anaknya untuk menolak ajakan orang lain baik dikenal ataupun tidak dikenal.

2. Lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah diharapkan memberikan pengarahan agama, moral, akhlak dan pengawasan terhadap anak-anak di bawah umur akan bahaya seks bebas (pendidikan seks).
3. Perlunya pendidikan bagi masyarakat dalam rangka mencegah perbuatan eksploitasi seksual pada anak.
4. Lembaga hukum khususnya jaksa dan hakim menuntut dan memutus hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku eksploitasi seksual pada anak supaya jera dan menjadi pelajaran bagi calon pelaku lainnya (tindak preventif).



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, Akademika Presindo, 2004.
- Abdussalam, R, dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, PTIK, 2014.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk dihukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Doi, Abdurrahman. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Efendi, Edrianto. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Cet II; Jakarta: PT Refika Aditama, 2011.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung, Refika Aditama, 2012.
- <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170488-hak-anak-menurut-islam/#ixzz1zSXacwvM>
- Juraiddi. *Jerat Perbudakan Masa Kini*. Jakarta, Bina Purna Pariwara, 2003.
- Kartono, Kartini. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*. Yogyakarta: Ma'had An-Nabawi, 2013.
- Lubis, Chairuman Suhrawandi K. *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Maududi, Maulana Abul A'la. *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Moeljatno. *KUHP*. Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Perlindungan Anak & Undang-undang RI No.11 th 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta, Permata Press, 2013.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Gema Insani, 2003.
- Suherman, Ade Maman. *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur "Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Batasan Umur"*. Jakarta: NLRP, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Susanti H, Esthi. *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual "sebuah perspektif organisasi masyarakat sipil"*. Surabaya, Hotline Surabaya, 2014.
- Umbara, Citra. *Undang-undang Perlindungan Anak*. Bandung, 2003.
- Venny, Adriana. *Jurnal Perempuan 29*. Jakarta, SMKG Desa Putera, 2003.
- Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a light green watermark in the background. It features a stylized archway with a central star and crescent. Inside the star is the year '1965'. Below the arch is an open book.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ke-Kajin 27/4-12 8

FORMAT PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI :

H a l : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

Buat draft
skripsi judul yg
di setuju
per 26/4-2015

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

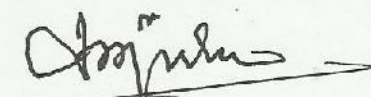
Nama : Nur Wahid Mushaddiq
NIM : 10300111047
Semester/Klpk : VIII / III
Angkatan : 2011

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

- ☒ Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merk dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
- ☐ 2. Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Seksual pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
- ☒ 3. Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.
- ☐ 4. Penganiayaan terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb

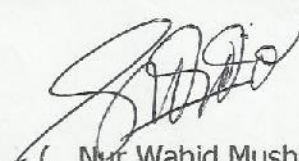
Mengetahui
Penasehat Akademik



(Abdul Rahman, S.Ag., M.Pd.)
NIP : 19731231 200501 1 034

Samata, 6 April 2015

Pemohon,



(Nur Wahid Mushaddiq)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax.
424836

Samata, 26 Mei 2015

Nomor : SL.2/PP.00.9/262 /2015
Hal : Undangan Seminar Proposal Skripsi
An. Sdr (i). Nur Wahid Mushaddiq

Kepada YTH.

1. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag (Pembimbing I)
2. Dr. Dudung Abdullah, M. Ag (Pembimbing II)

Di,

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Bersama ini, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Proposal Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 9 Juni 2015
Waktu : 13.00 wita
Tempat : Ruang *Munagasyah* Lantai II
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual Pada Anak
Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua Jurusan,

Hukum Pidana dan Ketatanegaraan



Dra. Nila Sastrawaty, M. Si

NIP. 19710712 199703 2 002

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

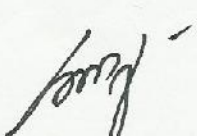
Nomor: /HPK/2015

Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Seksual pada Anak Berdasarkan Hukum
Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Gowa, 31 Agustus 2015
Penyusun,


Nur Wahid Mushaddiq
Nim. 10300111047


Pembimbing I


Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

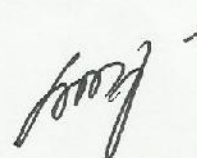
Pembimbing II


Dr. Dudung Abdullah, M. Ag
NIP: 19540203 198503 1002

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan


Dra. Nila Sastrawati, M. Si
NIP. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 1990031 003



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DAFTAR NILAI

UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

SEMESTER 9 WISUDA PERIODE DESEMBER

TAHUN AKADEMIK

Nama : HAR WAHID MUSHADDIQ
N I M : 10300111047
Jurusan : Hukum pidana dan ketatanegaraan.
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Eksploitasi Seksual terhadap Anak menurut UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKKP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
4	3	3,5	10,5	3,5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR



8 Desember 2015

Kasubbag.
Akademik dan Kemahasiswaan,

Hj. SURYANI, S.Sos.,MM.

NIP. 19661019 199503 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi **Nur Wahid Mushaddiq, Nim: 10300111047** mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **"Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Seksual pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam"** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Samata, 10 November 2015


Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003


Dr. Dudung Abdullah, M.Ag

NIP. 19540203 198503 1 002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No 63 Makassar Tlp. (0411) 8264924-82418279 Fax. 8264923

Kampus II Jl. Slt. Alauddin No 36 Samata Gowa Tlp. (0411) 4248236 Fax. 82214

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 568 Tahun 2015

TENTANG

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2015**

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** :
- Surat Permohonan :
 - Nama : Nur Wahid Musaddiq
 - N I M : 10300111047
 - Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
 - Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Desember 2015
 - Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
 - Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam"
- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 - c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - 6. Keputusan Rektor Nomor 192 Tahun 2009 tentang Pedoman Edukasi di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

- Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag
- Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum
- Penguji I : Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag
- Penguji II : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag
- Pelaksana : 1. Dra. Andi Masniah
2. Darmawati Samma. SE

- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2015;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



: Samata
: 15 Desember 2015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jln. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp (0411) 864928 – 864923
Kampus II Jln. Slt. Alauddin No. 36 Samata – Gowa Tlp 424835 Fax 424836

Nomor : SL.1/PP.00.9/1492/2015
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **UNDANGAN MUNAQASYAH**

Samata, 15 Desember 2015

Kepada

- Atas*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua Majelis)
 2. Dr. Hamsir, M.Hum (Sekartarais)
 3. Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag (Penguji I)
 4. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag (Penguji II)
 5. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Pembimbing I)
 6. Dr. Dudung Abdullah, M.Ag (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :

Nama : Nur Wahid Musaddiq
NIM : 10300111047
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah/Skripsi, *Insha Allah* dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Desember 2015
Buka Sidang : Pukul 08.30
Waktu : Pukul 09.00 Wita – selesai
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. *g*
NIP. 19621016 199003 1 003

RIWAYAT HIDUP



Nur Wahid Mushaddiq, dilahirkan di Makassar, pada tanggal 5 Mei 1994. Anak pertama dari 2 bersaudara dan merupakan buah cinta dari pasangan Drs. H. Muh. Amin Sulo, MM dan Hj. Nur Asia Nur.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2005 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros dan tamat pada tahun 2008. Kemudian tahun 2008 penulis kembali melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros dan tamat pada tahun 2011.

Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) Fakultas Syariah dan Hukum program strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HMJ HPK) periode 2013/2014. Sejak tahun 2011 sampai sekarang penulis aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa. Selain itu penulis juga aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan (HIPMI PT SUL-SEL).